

PENETAPAN PERWALIAN BAGI ANAK KORBAN TSUNAMI OLEH MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA BANDA ACEH

ZAHRATUL IDAMI

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

Banda Aceh City is in the special condition caused by the tsunami in which some children do not only lose their parents but also siblings, become victims, lose their residence because they were also destroyed by the tsunami, so that they have to live in refugee camps. For these children, guardians are needed to take care of and be responsible for the continuity of the children's lives in fulfilling their needs. Based on that situation, the problems which arise are, then: How does the implementation of the Custody Establishment for children victims of tsunami by the Sharia Court of Banda Aceh City? What are the obstacles faced in implementing the custody establishment referred to and what are the legal consequences? And what are the efforts made to overcome these obstacles? The data collection in this research is obtained through literature study and field research. The data obtained are analyzed using a qualitative approach and descriptive analysis method. The Custody Establishment is done through Sharia Court decision based on the petitions which meet the specified requirements. In the implementation of post-tsunami custody establishment, the establishment was decided by a single judge because of the circumstances at the time, but after the situation is better, the judge is, then, the panel of judges. The legal consequences of the establishment are the responsibilities of the guardians to the children and the properties of the children under their custody. The efforts made are settling the custody petition that the court has got using existing facilities, and holding seminars or dialogues that discuss the need for rules regarding the supervision of children and the properties of the children who are under custody.

Keywords: Sharia Court of banda Aceh, Victims of Tsunami, Custody Establishment

I. PENDAHULUAN

Gempa dan Gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, di Nanggroe Aceh Darussalam telah meninggalkan kesan yang sangat memilukan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Ratusan Ribu jiwa nyawa melayang dan puluhan ribu dinyatakan hilang. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya anak-anak menjadi yatim atau yatim piatu, karena kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya.

Jumlah yang kongkrit dari anak yatim atau yatim piatu tersebut belum ada angka yang pasti, namun diperkirakan mencapai puluhan ribu anak. Sebagian dari mereka

ada yang tinggal bersama keluarga pihak ayahnya atau keluarga pihak ibunya, juga masih ada yang tinggal di barak-barak pengungsian atau di rumah-rumah keluarga, serta ada juga yang tinggal di panti-panti asuhan.

Anak-anak yang masih di bawah umur yang ditinggal oleh orang tuanya oleh hukum dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga baginya diperlukan seorang wali yang akan mewakilinya dalam mengurus kepentingannya baik kepentingan yang bersifat pribadi ataupun kepentingan lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Masalah Perwalian ini menjadi masalah yang penting terutama bagi anak-anak korban tsunami beberapa waktu yang lalu, karena anak-anak tersebut harus diurus dan dijaga hartanya untuk keperluannya, selama ia belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam kondisi yang normal perwalian ini tidak menjadi masalah, karena salah seorang keluarga dekat dari anak tersebut secara ilmiah akan langsung bertindak sebagai wali menurut urutan kekerabatan dan biasanya tidak dimintakan penunjukan secara formal melalui pengadilan.

Dalam kondisi khusus akibat tsunami sebahagian anak bukan hanya kehilangan orang tuanya akan tetapi juga saudara kandungnya, kerabat dekat lainnya juga menjadi korban. Tempat tinggal juga hancur, sehingga mereka harus tinggal di barak-barak pengungsian. Bagi anak yang bernasib demikian wali sangat diperlukan untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan si anak dalam pemenuhan hidup mereka. Termasuk juga menjaga dan memelihara harta benda serta kekayaan atau warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Tugas dan tanggung jawab wali sebenarnya sangat berat karena seseorang wali di samping harus mengurus anak tersebut juga harus menjaga dan memelihara harta benda anak yatim tersebut. Kewajibannya juga harus mencatat baik pengeluaran maupun perubahan dari harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya agar harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada anak itu pada saat anak dewasa dalam keadaan baik dan jelas, dan tidak menimbulkan fitnah.